



**BUPATI HALMAHERA SELATAN  
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5265)
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengeloan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 Kabupaten Halmahera Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2019 Nomor 1 );

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Halmahera Selatan ini yang dimaksud dengan :

- memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Halmahera Selatan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

## BAB III

### SUMBER, BESARAN DAN PENETAPAN

#### Bagian keSatu Sumber dan Besaran

#### Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019
- (2) Alokasi Dana Desa pkan sebesar Paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 adalah Sebesar Rp.83.556.000.000,00 (Delapan Puluh Tiga Milyar lima Ratus lima puluh Enam Juta Rupiah).
- (4) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Setiap Desa diatur secara Proporsional.

#### Bagian keDua Penetapan Besaran

ADD Tahun Anggaran 2019 dibagi jumlah keseluruhan Desa di Kabupaten Halmahera Selatan yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM): dan

- b. Alokasi Formula, yaitu besarnya bagian ADD sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2019 yang akan dibagikan ke Desa berdasarkan Nilai bobot Desa yang dihitung dengan Rumus dan Variabel tertentu, yaitu : Luas Wilayah memiliki Bobot 15% (lima belas Persen), Jumlah Penduduk memiliki bobot 10% (Sepuluh Persen), angka kemiskinan memiliki bobot 50% (Lima Puluh Persen), indeks Kesulitan Geografis memiliki bobot 25% (Dua Puluh Lima Persen); selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
- c. Besaran ADDM sebesar 90% dari Besaran Total ADD
- d. Besaran ADDP sebesar 10% dari Besaran Total ADD

2) Alokasi Formula adalah sebagai berikut :

$$\text{ADD per Desa} = (\text{ADDM} + \text{ADDP})$$

Keterangan :

ADD Per Desa = Total Jumlah Alokasi Dana Desa setiap Desa

ADDM = Alokasi Dana Desa minimum

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional

ADDP =  $\{[(0,10 * JP) + (0,50 * LW) + (0,15 * AK) + (0,25 * IKG)]\}$ .

Keterangan

JP = Persentase jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Halmahera Selatan.

LW = Persentase luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Halmahera Selatan.

AK = Persentase Rumah Tangga miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Halmahera Selatan.

IKG = Persentase indeks kesulitan Geografis Desa Terhadap indeks kesulitan Geografis di Kabupaten Halmahera Selatan IKG setiap Desa terhadap IKG

#### BAB IV

#### MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN

##### Bagian ke Satu

##### Mekanisme Penyaluran

#### Pasal 5

ADD disalurkan dalam 5 (lima) tahap melalui Rekening masing-masing Desa dengan ketentuan :

- a. Tahap pertama sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari Jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa dengan dilampiri :

5. Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengesahan Kepala Desa;
  6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa;
  7. Nomor pokok wajib pajak Desa;
- b. Tahap kedua, ketiga, keempat dan kelima masing-masing 20% (Dua puluh Persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima setiap Desa setelah Desa mempertanggung jawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa setiap Tahapan disertai surat permohonan pencairan dari Kepala Desa.

Bagian Kedua  
PENGUNAAN

Pasal 6

1. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
  - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
  - b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
2. Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
3. Besaran penghasilan tetap dan Tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
4. Alokasi Dana Desa untuk membiayai pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
5. Alokasi Dana Desa Untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
6. Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saatevaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 7



- (2) Penyampaian Laporan realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- Tahap I Paling lambat minggu keempat Bulan Februari Tahun Anggaran berjalan ; dan
  - Tahap II laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa disampaikan paling lambat Pada Akhir Januari Tahun Berikutnya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**Pasal 9**

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha.

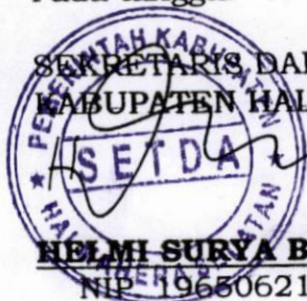
Pada tanggal 11 Januari 2019

**BUPATI HALMAHERA SELATAN**



Diundangkan di Labuha  
Pada tanggal 11 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



**NELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M**  
NIP. 19680621 198603 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2019  
NOMOR...3...



NOMOR : 3 TAHUN 2019

TANGGAL : 11 JANUARI 2019

DAFTAR ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ADDM	ADDP	ALOKASI DANA DESA PER-DESA
1	2	3	4	5	(6)= (4) +(5)
1	Pulau Makian	Matentengin	302,010	13,490.78	315,500
2	Pulau Makian	Waigitang	302,010	15,357.14	317,367
3	Pulau Makian	Waykion	302,010	14,745.63	316,755
4	Pulau Makian	Dalam	302,010	10,961.12	312,971
5	Pulau Makian	Ploili	302,010	17,616.83	319,626
6	Pulau Makian	Gitang	302,010	11,479.30	313,489
7	Pulau Makian	Wailoa	302,010	39,228.52	341,238
8	Pulau Makian	Dauri	302,010	47,203.86	349,214
9	Pulau Makian	Suma	302,010	29,552.69	331,562
10	Pulau Makian	Walo	302,010	14,168.25	316,178
11	Pulau Makian	Sangapati	302,010	35,176.86	338,186
12	Pulau Makian	Gurua	302,010	11,762.13	313,772
13	Pulau Makian	Gorup	302,010	11,132.93	313,143
14	Pulau Makian	Rabutdaiyo	302,010	40,272.38	342,282
15	Pulau Makian	Kyowor	302,010	12,157.80	314,167
16	Makian Barat	Malapat	302,010	15,694.64	317,704
17	Makian Barat	Bobawae	302,010	15,237.58	317,247
18	Makian Barat	Mateketen	302,010	11,577.65	313,587
19	Makian Barat	Ombawa	302,010	11,807.67	313,817
20	Makian Barat	Tegono	302,010	12,403.06	314,413
21	Makian Barat	Talapaon	302,010	17,556.79	319,566
22	Makian Barat	Sebelei	302,010	14,689.01	316,699
23	Kayoa	Ligua	302,010	15,984.65	317,994
24	Kayoa	Guruapin	302,010	39,113.39	341,123
25	Kayoa	Tawabi	302,010	38,597.57	340,607

26	Kayoa	Gafi	302,010	19,658.39	321,668
27	Kayoa	Talimau	302,010	38,849.84	340,859
28	Kayoa	Karamat	302,010	38,841.90	340,852
29	Kayoa	Bajo	302,010	18,609.58	320,619
30	Kayoa	Kida	302,010	14,472.64	316,482
31	Kayoa	Lelei	302,010	19,772.44	321,782
32	Kayoa	Gunange	302,010	15,902.06	317,912
33	Kayoa	Buli	302,010	38,354.48	340,364
34	Kayoa	Doroiamo	302,010	15,100.63	317,110
35	Kayoa	Siko	302,010	17,548.46	319,558
36	Kayoa	Laigoma	302,010	39,561.72	341,571
37	Kayoa Utara	Laromabati	302,010	40,651.97	342,662
38	Kayoa Utara	Ake Jailolo	302,010	15,888.09	317,898
39	Kayoa Utara	Ngokomalako	302,010	39,142.94	341,153
40	Kayoa Utara	Modayama	302,010	10,926.54	312,936
41	Kayoa Utara	Wayasipang	302,010	38,778.15	340,788
42	Kayoa Utara	Gayap	302,010	25,454.32	327,464
43	Kayoa Selatan	Orimakurunga	302,010	29,378.24	331,388
44	Kayoa Selatan	Pasir Putih	302,010	26,008.96	328,019
45	Kayoa Selatan	Sagawele	302,010	27,186.27	329,196
46	Kayoa Selatan	Posi-Posi	302,010	50,372.02	352,382
47	Kayoa Selatan	Ngute-Ngute	302,010	48,680.50	350,690
48	Kayoa Selatan	Laluin	302,010	58,058.91	360,069
49	Kayoa Barat	Fofao	302,010	23,993.89	326,004
50	Kayoa Barat	Bokimiake	302,010	23,965.22	325,975
51	Kayoa Barat	Busua	302,010	38,168.13	340,178
52	Kayoa Barat	Hatejawa	302,010	22,123.82	324,133
53	Kasiruta Timur	Marituso	302,010	33,681.15	335,691
54	Kasiruta Timur	Kou Balabala	302,010	32,904.65	334,914
55	Kasiruta Timur	Loleo Jaya	302,010	24,917.96	326,928
56	Kasiruta Timur	Loleo Mekar	302,010	23,619.00	325,629
57	Kasiruta Timur	Tawa	302,010	19,913.45	321,923
58	Kasiruta Timur	Jeret	302,010	34,529.01	336,539
59	Kasiruta Timur	Kasiruta Dalam	302,010	27,559.50	329,569

60	Kasiruta Timur	Tutuhu	302,010	25,485.28	327,495
61	Kasiruta Barat	Sengga Baru	302,010	38,866.97	340,877
62	Kasiruta Barat	Imbu Imbu	302,010	24,745.16	326,755
63	Kasiruta Barat	Sidanga	302,010	19,634.58	321,644
64	Kasiruta Barat	Lata Lata	302,010	19,497.30	321,507
65	Kasiruta Barat	Palamea	302,010	23,967.98	325,978
66	Kasiruta Barat	Kukupang	302,010	25,540.91	327,551
67	Kasiruta Barat	Arumamang	302,010	21,845.80	323,855
68	Kasiruta Barat	Marikapal	302,010	17,962.92	319,973
69	Kasiruta Barat	Bisori	302,010	39,348.00	341,358
70	Kasiruta Barat	Doko	302,010	20,029.72	322,039
71	Bacan Barat	Kusubibi	302,010	36,948.06	338,958
72	Bacan Barat	Indari	302,010	27,669.59	329,679
73	Bacan Barat	Nang	302,010	38,654.98	340,665
74	Bacan Barat	Kokotu	302,010	21,805.34	323,815
75	Bacan Barat	Wiring	302,010	27,749.13	329,759
76	Bacan Barat	Tawabi	302,010	30,895.97	332,906
77	Bacan Barat	Nondang	302,010	26,565.71	328,575
78	Bacan Selatan	Panamboang	302,010	37,020.19	339,030
79	Bacan Selatan	Sawadai	302,010	17,626.49	319,636
80	Bacan Selatan	Gandasuli	302,010	40,592.02	342,602
81	Bacan Selatan	Kubung	302,010	38,277.14	340,287
82	Bacan Selatan	Mandaong	302,010	37,651.88	339,662
83	Bacan Selatan	Kampung Makian	302,010	22,575.71	324,585
84	Bacan Selatan	Tembal	302,010	18,836.17	320,846
85	Bacan Selatan	Kupal	302,010	20,691.34	322,701
86	Bacan Selatan	Tuokona	302,010	18,852.00	320,862
87	Bacan Selatan	Papaloang	302,010	22,036.52	324,046
88	Bacan	Kaputusan	302,010	33,894.27	335,904
89	Bacan	Amasing Kali	302,010	27,085.03	329,095
90	Bacan	Sumae	302,010	26,614.26	328,624
91	Bacan	Amasing Kota	302,010	73,677.71	375,687
92	Bacan	Indomut	302,010	26,446.26	328,456
93	Bacan	Hidayat	302,010	32,932.49	334,942

94	Bacan	Amasing Kota Utara	302,010	52,669.84	354,679
95	Bacan	Labuha	302,010	75,451.39	377,461
96	Bacan	Suma Tinggi	302,010	54,160.99	356,171
97	Bacan	Marabose	302,010	42,818.82	344,828
98	Bacan	Belang Belang	302,010	37,449.80	339,459
99	Bacan	Tomori	302,010	29,140.81	331,150
100	Bacan	Awanggoa	302,010	16,197.73	318,207
101	Bacan	Amasing Kota Barat	302,010	76,828.04	378,838
102	Bacan Timur	Kaireu	302,010	26,140.29	328,150
103	Bacan Timur	Bori	302,010	30,599.46	332,609
104	Bacan Timur	Sabatang	302,010	47,506.00	349,516
105	Bacan Timur	Babang	302,010	36,463.84	338,473
106	Bacan Timur	Timlonga	302,010	21,282.51	323,292
107	Bacan Timur	Wayamiga	302,010	29,343.13	331,353
108	Bacan Timur	Sayoang	302,010	39,552.04	341,562
109	Bacan Timur	Goro-Goro	302,010	50,468.00	352,478
110	Bacan Timur	Sali Kecil	302,010	14,851.80	316,861
111	Bacan Timur	Nyonyifi	302,010	38,419.05	340,429
112	Mandioli Selatan	Galala	302,010	63,634.27	365,644
113	Mandioli Selatan	Jiko	302,010	71,043.77	373,053
114	Mandioli Selatan	Bahu	302,010	69,635.40	371,645
115	Mandioli Selatan	Lele	302,010	48,001.75	350,011
116	Mandioli Selatan	Yoyok	302,010	35,715.77	337,725
117	Mandioli Selatan	Tabalema	302,010	27,800.96	329,811
118	Kepulauan Botanglomang	Bajo	302,010	23,723.17	325,733
119	Kepulauan Botanglomang	Batutaga	302,010	40,218.59	342,228
120	Kepulauan Botanglomang	Sawangakar	302,010	23,731.52	325,741
121	Kepulauan Botanglomang	Paisumbaos	302,010	53,118.39	355,128
122	Kepulauan Botanglomang	Prapakanda	302,010	46,055.78	348,065
123	Kepulauan Botanglomang	Tanjung Obit	302,010	48,833.85	350,843
124	Kepulauan Botanglomang	Toin	302,010	17,754.67	319,764
125	Kepulauan Botanglomang	Kampung Baru	302,010	38,636.42	340,646
126	Bacan Barat Utara	Lolarogurua	302,010	14,480.79	316,490
127	Bacan Barat Utara	Yaba	302,010	59,181.58	361,191

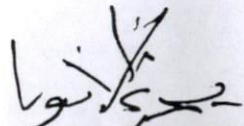
128	Bacan Barat Utara	Geti Baru	302,010	44,636.62	346,646
129	Bacan Barat Utara	Gilalang	302,010	49,413.07	351,423
130	Bacan Barat Utara	Nusa Babullah	302,010	50,187.51	352,197
131	Bacan Barat Utara	Jojame	302,010	54,246.72	356,256
132	Bacan Barat Utara	Geti Lama	302,010	44,403.26	346,413
133	Bacan Barat Utara	Sidopo	302,010	23,067.81	325,077
134	Bacan Timur Selatan	Wayaua	302,010	66,698.44	368,708
135	Bacan Timur Selatan	Silang	302,010	57,121.81	359,131
136	Bacan Timur Selatan	Pigaraja	302,010	58,776.62	360,786
137	Bacan Timur Selatan	Liaro	302,010	56,498.08	358,508
138	Bacan Timur Selatan	Wayakuba	302,010	58,194.46	360,204
139	Bacan Timur Selatan	Tabajaya	302,010	16,056.90	318,067
140	Bacan Timur Selatan	Tabangame	302,010	21,146.81	323,156
141	Mandioli Utara	Indong	302,010	38,251.47	340,261
142	Mandioli Utara	Waya	302,010	57,696.94	359,707
143	Mandioli Utara	Pelita	302,010	32,123.04	334,133
144	Mandioli Utara	Leleongusu	302,010	18,228.80	320,238
145	Mandioli Utara	Akedabo	302,010	36,475.59	338,485
146	Mandioli Utara	Bobo	302,010	37,665.72	339,675
147	Bacan Timur Tengah	Tomara	302,010	34,825.13	336,835
148	Bacan Timur Tengah	Tutupa	302,010	21,132.63	323,142
149	Bacan Timur Tengah	Songa	302,010	36,314.99	338,325
150	Bacan Timur Tengah	Bibinoi	302,010	45,085.36	347,095
151	Bacan Timur Tengah	Wayatim	302,010	28,184.28	330,194
152	Bacan Timur Tengah	Tabapoma	302,010	22,622.27	324,632
153	Bacan Timur Tengah	Tawa	302,010	59,206.42	361,216
154	Gane Barat Utara	Fulai	302,010	39,745.79	341,755
155	Gane Barat Utara	Dolik	302,010	96,203.05	398,213
156	Gane Barat Utara	Batulak	302,010	48,877.29	350,887
157	Gane Barat Utara	Boso	302,010	38,697.54	340,707
158	Gane Barat Utara	Samat	302,010	35,072.63	337,082
159	Gane Barat Utara	Nurjihah	302,010	29,093.86	331,103
160	Gane Barat Utara	Tokaka	302,010	29,420.37	331,430
161	Gane Barat Utara	Samo	302,010	30,858.43	332,868

162	Gane Barat Utara	Gumira	302,010	34,951.61	336,961
163	Gane Barat Utara	Suka Damai	302,010	23,379.10	325,389
164	Gane Barat Utara	Posi Posi	302,010	14,586.93	316,597
165	Gane Barat Utara	Moloku	302,010	25,055.83	327,065
166	Gane Barat	Lemo Lemo	302,010	19,680.00	321,690
167	Gane Barat	Oha	302,010	25,257.88	327,268
168	Gane Barat	Balitata	302,010	24,864.04	326,874
169	Gane Barat	Cango	302,010	54,294.25	356,304
170	Gane Barat	Saketa	302,010	42,753.49	344,763
171	Gane Barat	Papaceda	302,010	25,442.58	327,452
172	Gane Barat	Tabamasa	302,010	21,389.63	323,399
173	Gane Barat	Doro	302,010	24,723.01	326,733
174	Gane Barat	Koititi	302,010	98,020.81	400,030
175	Gane Barat	Bumi Rahmat	302,010	29,782.21	331,792
176	Gane Barat Selatan	Jibubu	302,010	25,009.57	327,019
177	Gane Barat Selatan	Awis	302,010	37,888.80	339,898
178	Gane Barat Selatan	Pasipalele	302,010	21,390.04	323,400
179	Gane Barat Selatan	Yamli	302,010	33,413.93	335,424
180	Gane Barat Selatan	Gane Dalam	302,010	25,778.98	327,789
181	Gane Barat Selatan	Tawa	302,010	33,037.83	335,047
182	Gane Barat Selatan	Sekely	302,010	46,075.19	348,085
183	Gane Barat Selatan	Dowora	302,010	19,023.77	321,033
184	Gane Timur Tengah	Luim	302,010	27,832.09	329,842
185	Gane Timur Tengah	Tabahidayah	302,010	20,617.20	322,627
186	Gane Timur Tengah	Bisui	302,010	45,103.49	347,113
187	Gane Timur Tengah	Matuting	302,010	14,891.35	316,901
188	Gane Timur Tengah	Tabahijrah	302,010	19,026.02	321,036
189	Gane Timur Tengah	Matuting Tanjung	302,010	27,064.83	329,074
190	Gane Timur Tengah	Tagia	302,010	33,366.20	335,376
191	Gane Timur Tengah	Lelewi	302,010	20,395.59	322,405
192	Gane Timur	Foya	302,010	17,167.48	319,177
193	Gane Timur	Foya Tobaru	302,010	29,991.99	332,002
194	Gane Timur	Kotalow	302,010	15,948.29	317,958
195	Gane Timur	Wosi	302,010	33,264.12	335,274

196	Gane Timur	Maffa	302,010	26,884.50	328,894
197	Gane Timur	Lalubi	302,010	27,932.41	329,942
198	Gane Timur	Batonam	302,010	32,849.35	334,859
199	Gane Timur	Kebun Raja	302,010	15,760.62	317,770
200	Gane Timur	Akelamo	302,010	33,954.63	335,964
201	Gane Timur	Tobaru	302,010	19,461.31	321,471
202	Gane Timur	Tanjung Jere	302,010	28,241.96	330,252
203	Gane Timur	Sumber Makmur	302,010	14,244.15	316,254
204	Kepulauan Joronga	Yomen	302,010	31,239.37	333,249
205	Kepulauan Joronga	Liboba Hijrah	302,010	21,868.20	323,878
206	Kepulauan Joronga	Kakupang	302,010	38,477.19	340,487
207	Kepulauan Joronga	Gonone	302,010	30,651.13	332,661
208	Kepulauan Joronga	Pulau Gala	302,010	49,049.79	351,059
209	Kepulauan Joronga	Kurunga	302,010	74,744.32	376,754
210	Kepulauan Joronga	Tawabi	302,010	22,261.48	324,271
211	Gane Timur Selatan	Sawat	302,010	37,762.88	339,773
212	Gane Timur Selatan	Ranga Ranga	302,010	29,649.24	331,659
213	Gane Timur Selatan	Gane Luar	302,010	38,164.12	340,174
214	Gane Timur Selatan	Kuwo	302,010	41,390.47	343,400
215	Gane Timur Selatan	Gaimu	302,010	26,247.62	328,257
216	Obi	Anggai	302,010	29,456.03	331,466
217	Obi	Kawasi	302,010	20,023.88	322,034
218	Obi	Jikotamo	302,010	29,625.63	331,635
219	Obi	Laiwui	302,010	55,214.68	357,224
220	Obi	Air Mangga Indah	302,010	23,469.03	325,479
221	Obi	Buton	302,010	41,052.80	343,062
222	Obi	Akegula	302,010	22,372.68	324,382
223	Obi	Baru	302,010	37,920.43	339,930
224	Obi	Sambiki	302,010	35,974.38	337,984
225	Obi Selatan	Wayaloar	302,010	31,567.72	333,577
226	Obi Selatan	Loleo	302,010	50,387.62	352,397
227	Obi Selatan	Soligi	302,010	98,185.16	400,195
228	Obi Selatan	Bobo	302,010	37,714.43	339,724
229	Obi Selatan	Gambaru	302,010	36,906.84	338,916

230	Obi Selatan	Ocimaloleo	302,010	43,393.08	345,403
231	Obi Selatan	Fluk	302,010	58,190.01	360,200
232	Obi Selatan	Mano	302,010	61,971.27	363,981
233	Obi Barat	Manatahan	302,010	25,995.34	328,005
234	Obi Barat	Jikohai	302,010	31,935.15	333,945
235	Obi Barat	Alam Pelita	302,010	36,576.35	338,586
236	Obi Barat	Soa Sangaji	302,010	23,834.89	325,845
237	Obi Barat	Tapa	302,010	18,711.90	320,722
238	Obi Barat	Alam Kenanga	302,010	16,424.48	318,434
239	Obi Utara	Cap	302,010	31,632.84	333,642
240	Obi Utara	Pasir Putih	302,010	27,816.30	329,826
241	Obi Utara	Waringi	302,010	22,413.70	324,423
242	Obi Utara	Galala	302,010	18,161.33	320,171
243	Obi Utara	Madopolo	302,010	27,152.41	329,162
244	Obi Utara	Madopolo Barat	302,010	25,153.80	327,163
245	Obi Utara	Madopolo Timur	302,010	20,640.33	322,650
246	Obi Timur	Sum	302,010	44,710.38	346,720
247	Obi Timur	Susepe	302,010	23,334.96	325,345
248	Obi Timur	Wooi	302,010	31,567.78	333,577
249	Obi Timur	Kelo	302,010	35,103.65	337,113
	<b>JUMLAH</b>		<b>75,200,400</b>	<b>8,135,600</b>	<b>83,336,000</b>

BUPATI HALMAHERA SELATAN

  
**BAHRAIN KASUBA**



NOMOR : 3 TAHUN 2019  
TANGGAL : 11 JANUARI 2019

DAFTAR ALOKASI DANA DESA PERSIAPAN TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ADDM	ADDP	ALOKASI DANA DESA PER- DESA
					(6)= (4) +(5)
1	2	3	4	5	
1	GANE TIMUR	WAIMILI	198,000,000	22,000,000	220,000,000
	Jumlah		198,000,000	22,000,000	220,000,000

BUPATI HALMAHERA SELATAN

